

Pola Konsumsi di Kota Surabaya Sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ully Prisandini¹, Arjunaidi Viky Rifandi², Muhammad Yasin³

Universitas 17 Agustus 1945

ullyprisandini@gmail.com, arjun070603@gmail.com, yasin@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan adalah target seluruh pemerintahan daerah. Namun seringkali cara melakukan pengukuran kesejahteraan ini menjadi perdebatan. Beberapa pihak menggunakan ukuran kemiskinan dari PBB. Namun banyak yang mengkritik karena kesejahteraan bukan hanya tentang bisa memenuhi kebutuhan pokok. Karena itulah, penulis menggunakan indikator berupa pola konsumsi yang akan menunjukkan kemampuan beli dari masyarakat Indonesia terutama di Kota Surabaya sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal yang diukur oleh penulis adalah pola konsumsi bahan pokok dengan meminjam teori PPP (*Purchasing Power Parity*), Tingkat pembelian barang sekunder dan tersier dalam bentuk pembelian rumah dan kendaraan roda empat serta komparasi dengan indikator perekonomian Surabaya

Kata kunci : Purchasing Power Parity (PPP), Ekonomi, Surabaya, PBB, Konsumsi

Abstract

Prosperity is always the main target of every government. However, methods to measure prosperity are debatable. Several people argue that the poverty standard from United Nations is valid-enough to decide if people have fulfilled their needs. This measurement does not acknowledge that people also have wants and need to fulfill them. I decided to research Surabaya to understand the prosperity issues by using Purchasing Power Parity theory, the ability of people in Surabaya to fulfill their secondary wants by measuring the total marketing of housing and automobiles, and comparing the economic growth indicator of Surabaya.

Keywords: *Purchasing Power Parity (PPP), Economy, Surabaya, United Nations, Consumption*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan ideal dari setiap pemerintah. Namun, untuk mencapai kesejahteraan itu banyak indikator yang digunakan. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah standar kemiskinan yang dibuat oleh BPS dan PBB (Hallegatte et al., 2020; Hill, 2021; Nations, n.d.). Namun cara berpikir tentang kemiskinan ini sering mendapatkan kritik karena dianggap sebagai usaha untuk mensimplifikasi masalah. PBB maupun BPS hanya menyebut bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tentu saja dasar pemikiran ini sangat kapitalistik dan menguntungkan pengusaha. Sebaliknya, isu kemiskinan jauh lebih kompleks daripada sekedar untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan ini bahkan bisa sangat

Received April 15, 2023; Revised May 10, 2023; Accepted 1 June, 2023

* Ully Prisandini, ullyprisandini@gmail.com

mendasar dan tidak hanya menggunakan ukuran PBB bahwa seseorang dianggap miskin jika memiliki penghasilan kurang dari dua dollar per hari. Kenyataannya, isu yang dihadapi jauh lebih besar daripada sekadar keterbatasan penghasilan di bawah dua dollar perhari. Ada beberapa faktor yang membuat kita bisa mempertanyakan definisi kemiskinan itu.

Misalnya saja demikian, jika seseorang ingin bersekolah di sekolah A, namun tidak bisa karena keterbatasan biaya, apakah itu bukan berarti bahwa dia miskin sehingga harus memilih sekolah alternatif? Hal ini membawa kita pada definisi baru kemiskinan yaitu apa yang disebut sebagai *Freedom From Wants*. Istilah ini muncul dari lukisan Norman Rockwell namun kemudian menjadi pembahasan serius dan filosofis mengenai bagaimana seharusnya manusia dianggap bebas dari kemanusiaan dan hal itu adalah 'bebas dari keinginan'. Karena itulah digunakan ukuran baru mengenai kesejahteraan, seberapa kuat daya beli masyarakat sehingga ia 'bebas dari keinginan'

Dasar berpikir inilah yang kemudian penulis terapkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di Kota Surabaya. Maksud dari penulis adalah mengetahui seberapa sejahtera masyarakat kota Surabaya. Secara umum, kota Surabaya sudah dianggap sebagai kota yang sangat maju dan mengalami kemajuan yang signifikan. Namun perlu dinilai lebih dalam apakah sudah ada pemerataan pendapatan atau dugaan kita aset ekonomi hanya terpusat pada kelompok tertentu sehingga tidak bisa membantu perkembangan Surabaya ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan data dari BPS, GAIKINDO dan data data terkait mengenai kemampuan warga Surabaya dalam melakukan belanja untuk kebutuhan mereka. Periode penelitian ini sendiri adalah lima tahun terakhir untuk menjamin bahwa penelitian ini tetap valid untuk diterapkan di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus untuk menemukan bagaimana tingkat kesejahteraan di Surabaya secara riil. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan teori *Purchasing Power Parity* serta tingkat pembelian barang sekunder seperti mobil dan rumah sebelum kemudian dikomparasikan dengan pertumbuhan ekonomi makro kota Surabaya.

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data dari BPS dan asosiasi yang menjual barang barang mewah seperti barang sekunder dan tersier. Selain itu studi studi jurnal dan artikel lain mengenai kesejahteraan Surabaya juga menjadi bahan patokan untuk pengukuran ini.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel artikel berita terkait dan sumber sumber lain yang sekiranya bisa melengkapi

analisa data dalam penelitian ini agar mendekatkan hasil penelitian pada validasi yang bisa dipertanggung jawabkan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Seberapa besarkah pola konsumsi dapat menentukan kesejahteraan suatu tempat? Metode apa yang tepat? Tentu saja pola konsumsi seseorang atau suatu kelompok bisa memberikan kita gambaran bagaimana kesejahteraan seseorang karena pola konsumsi memberikan kita gambaran seberapa kuat kemampuan seseorang dalam melakukan pembelian suatu barang. Namun bagaimana cara mengukur pola konsumsi untuk tingkat kesejahteraan ini masih menjadi perdebatan. Beberapa menggunakan metode indikator salah satunya *Purchasing Power Parity*.

Ternyata hal tersebut pernah dilakukan di beberapa tempat. Salah satu teori yang pernah digunakan adalah *Big Mac Index* yang pernah dikeluarkan oleh majalah ekonomi terkemuka *The Economist* pada tahun 1986 (*Our Big Mac Index Shows How Burger Prices Are Changing*, n.d.). *Big Mac Index* adalah suatu cara mengukur *purchasing power parity (PPP)* yaitu membandingkan harga barang di dua negara sebelum kemudian mengeliminasi faktor yang mempengaruhi tingkat perbedaan harga sehingga didapat angka yang menunjukkan kekuatan daya beli di sebuah negara.

Ada tiga langkah untuk menghitung *Purchasing Power Parity* (Rogoff, 1996). Yang pertama adalah dengan membagi harga suatu produk sebagai perbandingan. Yang pertama adalah Coca Cola (1L) di Amerika dan Perancis. Harga di Amerika Serikat adalah 2 dollar sementara di Perancis 1L Coca Cola seharga 2,3 Euro. Maka PPP adalah $2,3/2$ maka akan kita temukan angka 1,15 yang artinya setiap 1 dollar Amerika yang digunakan untuk membeli 1L Coca Cola, maka kita akan mendapatkan kualitas dan kuantitas yang sama di Perancis dengan harga 1,15. Inilah yang dilakukan *Big Mac Index*, namun harga yang mereka bandingkan adalah *Big Mac*. Namun ini baru langkah pertama karena kemudian harus dilakukan usaha berupa pengelompokan minuman Coca Cola ini dalam kelas apa sebelum kemudian melakukan metode statistik regresi untuk membandingkan kekuatan penjualan Coca Cola ini dibandingkan nilai GDP.

Hal ini bisa kita lakukan dengan Indonesia. Harga Big Mac di Indonesia adalah 41,000 Ribu Rupiah atau kita sebut saja 4 rupiah setelah redominisasi karena sistem nominasi Indonesia dan Amerika Serikat berbeda. Lalu kita bandingkan dengan harga Big Mac di Amerika Serikat yaitu 5,15 US\$. Maka dengan rumus PPP, kita akan menemukan bahwa untuk 1 Dollar di Indonesia akan mendapat kualitas dan kuantitas yang sama jika kita membayar 1,2 Dollar. PPP ini juga kemudian bisa digunakan untuk menghitung nilai mata uang apakah *undervalued* atau *overvalued*.

Dari rumus yang ada, kita temukan apakah mata uang kita dinilai sesuai atau tidak. Kita temukan bahwa 1 dollar setara dengan 14,000 Rupiah. Kita potong redenominasi 3 angka 0 di belakang agar nilai dollar dan Rupiah dalam level setara. Kita temukan perbandingannya adalah 1 : 14 atau 0,07. Maka dengan perhitungan

ini 1 dollar di Amerika Serikat setara dengan 0,07 Rupiah di Indonesia. Namun yang terjadi untuk Big Mac, jika kita membayar 1 Dollar di Indonesia, kita harus membayar 1,2 Dollar di Amerika Serikat untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang sama. Itu artinya ada gap 1,13. Berapa Persen 1,13 dibanding nilai PPP? Hasilnya adalah 94 persen, artinya Rupiah dihargai *undervalued* hingga 94 persen. Ini dengan menggunakan patokan *Big Mac Index* cara yang sederhana namun tentu saja ada beberapa kelemahan seperti (1) *Big Mac* adalah makanan yang mahal di Indonesia, namun makanan rakyat/ murah di Amerika Serikat. Jadi faktor *value* dan posisi suatu makanan di dalam suatu kultur juga berpengaruh besar untuk kita bisa tahu seberapa besar nilai dari suatu makanan (2) Volume penjualan *Big Mac* di Amerika Serikat dan Indonesia tentu berbeda. Karena itulah anggapan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan membeli setara 1:1,2 dengan warga Amerika Serikat sangat bisa diperdebatkan dan menjadi sebuah usaha simplifikasi masalah ketimbang usaha penyelesaian yang sistematis (3) Perlu ada perbandingan lagi dengan *GDP* secara keseluruhan. Meski demikian, ide membandingkan harga pada komoditas yang sama ini dianggap sebagai salah satu jalan untuk menemukan seberapa sebenarnya kekuatan daya beli di kota Surabaya.

Untuk melakukan penelitian ini dan mengetahui seberapa besar kekuatan pembelian dibanding kesejahteraan, penulis akan membandingkan UMR Surabaya dengan UMR di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil yang didapat adalah UMR Surabaya di angka 4,47 Juta sementara UMR di Jakarta adalah 4,41 Juta Rupiah. UMR kota Bandung ada di angka 3,9 Juta Rupiah lalu Yogyakarta ada di angka 2,4 Juta Rupiah (*Badan Pusat Statistik, n.d.-a*).

Untuk mempermudah sistem ini, kita akan menggunakan perbandingan di tiga kota terbesar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan dan Surabaya. Berdasarkan nilai UMR yang ada, maka seharusnya perbandingan Jakarta : Medan : Surabaya adalah; 4,41 : 3,00 : 4,47. Kita lakukan penyetaraan dengan menganggap Medan sebagai 1, maka kita temukan bahwa seharusnya perbandingan adalah sebagai berikut: 1,47: 1 : 1,49. Artinya, jika menggunakan patokan ini maka harga beras di Surabaya seharusnya 1,49 kali lebih mahal daripada di Medan dan di Jakarta harga beras harusnya 1,47 kali. Jika ternyata ada *gap* maka bisa kita katakan bahwa kesejahteraan di suatu tempat lebih tinggi dari daerah lainnya atau malah sebaliknya yaitu lebih rendah. Untuk membandingkannya, penulis memutuskan menggunakan indikator empat bahan pokok yang mudah diukur yaitu harga beras (kualitas disamakan, dalam hal ini adalah kualitas premium), harga daging sapi, harga daging ayam dan minyak goreng beserta perbandingannya dengan Medan sebagai patokan.

Hasilnya adalah berikut ini (Per Maret 2023).(*Harga Ayam Medan 1 Kg - Google Search, n.d.; Harga Daging Sapi Di Medan Bertahan Rp 130 Ribu per Kg | Republika Online, n.d.; Informasi Pangan Jakarta, n.d.; Update Harga Beras Hari Ini, Sabtu 18 Maret 2023: Beras Medium Masih Stabil Rp 11.900 per Kg - TribunNews.Com, n.d.; Update Harga Pangan Hari Ini: Harga Minyak Goreng Curah Turun, n.d.*)

	Beras	Daging Sapi	Daging Ayam	Minyak Goreng
Surabaya	Rp12.800	Rp146.500	Rp38.000	Rp15.000
Jakarta	Rp11.900	Rp145.000	Rp40.767	Rp16.850
Medan	Rp12.000	Rp130.000	Rp22.000	Rp11.500

Dengan patokan ini akan kita hitung perbandingan harga beras di Medan, Jakarta dan Surabaya adalah 1 : 0,99 ; 1,06.

Selanjutnya untuk Daging Sapi adalah 1 : 1,11 : 1,12

Berikutnya Daging ayam per ekor adalah 1 : 1,8 : 1,7

Kita beralih ke Minyak Goreng, perbandingannya adalah 1 : 1,4 : 1,3

Rata rata perbandingan Medan : Jakarta : Surabaya adalah 1 : 1,43 : 1,37

Seharusnya harga di Surabaya 1,49 kali lebih mahal daripada di Medan. Namun dari empat bahan pokok, angkanya hanya 1,37 kali saja lebih mahal. Seharusnya harga di Surabaya dibanding Jakarta adalah 1,01 kalinya lebih mahal. Akan tetapi pada kenyataannya harga di Surabaya justru 0,95 kali lebih mahal (lebih murah-*catatan penulis*) daripada harga di Jakarta. Pada *sub-bab* berikutnya, kita akan membahas *PPP* ini secara lebih detail.

Dugaan Ketidakmerataan Pendapatan

Kemampuan beli warga Surabaya ternyata lebih rendah dari UMRnya dengan patokan tiga kota terbesar. Maka dapat diajukan dua argumen, yang pertama bahwa pemerintah berhasil mengendalikan harga. Atau yang kedua, pemerintah terpaksa mengendalikan harga karena warga Surabaya tidak memiliki daya beli yang sesuai dengan UMRnya. Pola konsumsi yang **tidak seimbang dengan UMR** ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh sebenarnya kesejahteraan warga Surabaya. Jadi, apakah sebenarnya UMR warga Surabaya ini lebih besar sehingga membuat mereka memiliki kekuatan beli yang kompetitif atau apakah harga bahan pokok didorong agar dapat terjangkau oleh orang-orang yang tidak memiliki daya beli kuat. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

Seharusnya, pembentukan UMR dibuat dengan memperhatikan komponen-komponen utama dari kebutuhan buruh dan juga komponen yang diajukan pemerintah. Yang dapat kita pelajari adalah memang proses politis dan lobi terlibat dalam hal ini dan hal tersebut merupakan dinamika yang sah saja (Bossler & Schank, 2020; Murniati, 2021; Suhartini et al., 2019). Beberapa studi memperlihatkan kondisi yang sama. Namun komponen empat bahan pokok yaitu beras, daging sapi, ayam dan minyak goreng ini selalu ada dalam formula apapun. Dengan demikian ketika ditemukan permasalahan dimana muncul perbandingan tidak setara, langkah yang harus diambil adalah analisis apakah regulasi UMR tidak dipenuhi sehingga banyak pekerja bekerja di bawah UMR. Lalu, apakah distribusi kekayaan di Surabaya

terpenuhi atau tidak? Dan seterusnya. Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan perbandingan indeks gini di Surabaya Jakarta dan Medan.

Indeks Gini adalah alat untuk mengukur ketimpangan sosial yang terjadi di suatu daerah. Ukuran dari indeks Gini adalah 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka tingkat kesetaraan tercapai dengan sempurna. Dari hasil perbandingan dengan Indeks Gini kita dapat melihat gejala awal masalah sosial di suatu tempat (Hill, 2021). Hal inilah yang akan kita teliti di Surabaya dengan perbandingan di Jakarta, Medan dan Indonesia. Dari pemikiran penulis, jika indeks Gini Surabaya tinggi, maka dapat kita sebut ada masalah dalam sistem kesejahteraan dan penegakkan regulasi di Surabaya. Sebaliknya jika Indeks Gini rendah, maka dapat kita katakan penegakkan regulasi dan distribusi pendapatan sudah dilakukan dengan tepat sehingga terciptalah hasil sesuai dengan pola konsumsi masyarakat Surabaya. Bisa kita katakan bahwa memang tepat UMR telah mengalami kenaikan yang signifikan dan dapat bersaing secara kompetitif dengan harga bahan pokok sehingga kemampuan beli masyarakat menjadi sangat bersaing. Ini merupakan pertanda positif.

Hasil yang kita dapatkan adalah Indeks Gini di Surabaya adalah 0,365. Di tingkat nasional, Indeks Gini Indonesia adalah 0,381. Jakarta mencatat Indeks Gini 0.412 dan Indeks Gini Medan adalah 0,399. Semua data diambil dari BPS, hasilnya indeks Gini Surabaya di bawah rata rata nasional meski tidak jauh namun setidaknya menunjukkan kerja keras yang telah dilakukan dengan hasil yang cukup menggembirakan. Artinya harga yang lebih rendah di Surabaya bukan karena ketidakmerataan pendapatan melainkan karena kebijakan pengendalian harga yang baik dari pemerintah. Oleh karena itulah dalam prosesnya penulis meyakini perlu ada ukuran lain untuk mengetahui seberapa jauh kesetaraan warga Surabaya. Karena itulah indeks yang akan digunakan adalah tingkat kredit pembelian rumah dan penjualan kendaraan roda empat. Alasan mengapa dua hal tersebut dipilih adalah karena secara norma di Indonesia kesuksesan karir orang diukur dari dua hal tersebut, eksistensi rumah dan kendaraan roda empat (Ingarianti et al., 2022). Kedua kebutuhan ini dianggap mendekati kebutuhan tersier dan tingkat belanja pada dua hal ini menunjukkan kesejahteraan warga Surabaya berdasar pada kemampuan beli mereka.

Tingkat Pembelian Rumah di Surabaya

Tingkat pembelian rumah di Surabaya mengalami trend peningkatan pada 2022. Harga rumah naik 0,7 persen per kuartal dan untuk *year on year* pada kuartal empat tahun 2021, peningkatannya di angka 1,04 persen. Tren kenaikan ini juga diiringi dengan menurunnya suplai perumahan pada 2022 (*Pasar Properti Di Surabaya Awal 2022 Dan Rekomendasinya*, n.d.). Ini berarti konsumsi rumah di Surabaya meningkat dan permintaannya juga menunjukkan trend yang positif.

Indikator pertumbuhan pasar perumahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya sudah bisa menaikkan konsumsi non-makanan ke barang barang sekunder bahkan tersier. Hal ini pernah diteliti oleh beberapa pihak dan merupakan indikator yang baik daripada pertumbuhan ekonomi Surabaya yang semakin menjanjikan (Hanum, 2018; Miranti & Syaikat, 2016; Puspita & Agustina,

2019). Karena itulah, pembelian rumah di Surabaya yang terhitung mengalami kenaikan positif menunjukkan kesejahteraan rakyat Surabaya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa perlu dilakukan juga penelitian mengenai regulasi kebijakan perumahan di Surabaya agar kita bisa memahami apakah pembelian rumah yang meningkat ini karena murni daya beli warga Surabaya sedang tinggi atau ada faktor faktor lain seperti paket perbankan yang memberi KPR dengan bunga rendah serta berbagai bentuk bantuan bantuan lain yang membuat harga rumah menjadi lebih rendah dari seharusnya dan tidak bisa menjadi pertanda atau indikasi bahwa kesejahteraan warga Surabaya mengalami peningkatan sebab datanya terhitung tidak netral. Data regulasi perbankan dan finansial ini tidak penulis temukan terbuka dan dapat ditemukan secara terbuka karena itulah penulis tidak memasukkannya dalam faktor penelitian meski diakui jika memang ada maka sedikit banyak dapat berpengaruh pada pengukuran tingkat kesejahteraan.

Perlu diketahui juga letak letak kepadatan di kota Surabaya. Apakah pembangunan rumah sudah dibangun di wilayah wilayah yang ideal atau belum karena pembangunan rumah di daerah pinggiran dengan harga miring juga akan menjadi salah satu faktor yang membuat data tidak netral sehingga sulit untuk melacak sebenarnya seberapa besar tingkat kesejahteraan warga Surabaya. Dalam penelitian penelitian berikutnya, bagi pihak yang memiliki data kepadatan pembangunan rumah di Surabaya dan persebarannya, perlu memasukkan hal ini sebagai faktor faktor yang juga berpengaruh. Untuk penentuan harga tanah asli dapat digunakan dengan metode regresi linear yang coba menggabungkan faktor faktor lokasi tanah dan harganya (Alfiyatin et al., 2017; Lu et al., 2017). Kita harus melihat apakah warga Surabaya benar benar membeli rumah karena memiliki daya beli kuat atau karena mereka menemukan harga tanah yang murah. Dengan demikian maka dapat tercirikan sebenarnya seberapa kuat kesejahteraan warga Surabaya.

Penulis mengusulkan indikator lain yaitu pengukuran berdasarkan batas harga dari suatu rumah dan tanah. Jika yang dihitung adalah penjualan rumah dengan harga diatas satu Miliar Rupiah, maka akan terlihat seberapa besar kekuatan pembelian dari warga Surabaya. Untuk secara umum, belum ada penelitian yang memberikan kita gambaran penjualan rumah di Surabaya yang berharga di atas satu Miliar Rupiah. Namun, yang menarik data dari Citraland, porsi penjualan rumah yang mencapai 2-3 Miliar Rupiah per unit sudah menunjukkan performa yang sangat baik.

Tingkat Pembelian Kendaraan Roda Empat (Mobil)

Gabungan Industri Kendaraan Motor Indonesia/ Gaikindo melaporkan tingkat kunjungan pada pameran terbesar mereka sangat tinggi. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda empat di Surabaya pada tahun 2022 naik hingga 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Setiap tahunnya, GIIAS—pameran terbesar dari GAIKINDO—menghimpun dana hingga 300 Milyar Rupiah lebih. Perkembangan pasar auto-mobile ini terhitung sangat baik (*GIIAS Surabaya 2022 Targetkan Transaksi Hingga Rp 300 Miliar – GAIKINDO*, n.d.).

Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa Masyarakat Surabaya sudah mampu membeli barang Tersier dan memberikan kita penegasan bahwa Surabaya merupakan pasar yang sangat produktif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

yang kompetitif. Keberadaan GAIKINDO di Surabaya menunjukkan pasar otomotif yang terus naik.

Namun lagi lagi banyak faktor yang membuat indikator penjualan mobil ini tidak netral. Penulis memutuskan untuk menggunakan patokan nilai penjualan mobil di atas 500 Juta Rupiah. Hal ini untuk melihat seberapa kuat kekuatan membeli atau kesejahteraan warga Surabaya. Sebab, jika menggunakan patokan harga di bawah 200 Juta, maka kita bicara mobil LCGC yang seringkali penjualannya memiliki unsur kredit bunga ringan yang lagi lagi tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan warga Surabaya secara obyektif. Oleh sebab itulah diperlukan cara pengukuran yang jauh lebih obyektif yaitu tingkat penjualan mobil di atas 500 Juta Rupiah. Hasilnya belum ada nilai pengukuran yang lengkap, akan tetapi penulis menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan indikator data harga mobil premium untuk menjadi komponen pengukuran kesejahteraan warga Surabaya.

Indikator Umum

Setelah melihat tingkat harga bahan pokok dengan meminjam teori *PPP*, serta tingkat pembelian barang mewah. Maka kita akan melakukan pengecekan pada indikator lain yaitu PRDB (*Produk Regional Domestik Bruto*) dan pertumbuhan ekonomi kota Surabaya. Secara mengejutkan pertumbuhan ekonomi Surabaya ada di angka 7,17 Persen pada tahun 2022 (*Pemerintah Kota Surabaya, n.d.-a*). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Surabaya mencapai 655,2 Triliun Rupiah (*Badan Pusat Statistik, n.d.-b*). Menilik nilai tersebut, pertumbuhan ekonomi Surabaya melebihi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah 5,34 Persen (*Bappeda Provinsi Jawa Timur – Ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 Tumbuh 5,34 Persen, n.d.*). Artinya, ada gap pertumbuhan ekonomi sampai 2 persen dan angka itu terhitung cukup besar. Angka ini bahkan akan lebih terlihat mencolok jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di angka 5,3 persen (*Badan Pusat Statistik, n.d.-c*). Fenomena pertumbuhan ekonomi yang cepat ini tentu menimbulkan pertanyaan. Komoditi apa saja yang tumbuh dengan baik di Surabaya.

Berdasarkan data dari pemerintah kota Surabaya, ada beberapa industri yang hidup di kota Surabaya yaitu industri jasa dan perdagangan (*Pemerintah Kota Surabaya, n.d.-b*). Untuk perdagangan, Surabaya memiliki pasar modern dan juga Pelabuhan besar yaitu Tanjung Perak yang terhubung dengan beberapa kawasan industri yaitu SIER, Berbek, maupun Margomulyo. Sebagai penunjang, Surabaya juga menyediakan perkantoran yaitu Wisma Intiland, BRI Tower, Bumi Mandiri dan sebagainya agar pebisnis nyaman di kota Surabaya. Untuk bantuan pinjaman, Kota Surabaya telah menyediakan berbagai fasilitas pinjaman lewat keberadaan 61 instansi perbankan yang terdiri atas 6 bank pemerintah, 2 bank pembangunan daerah, 42 Bank Swasta Nasional, serta 11 Bank Internasional. Kesiapan Surabaya sebagai kota dagang terhitung luar biasa. Dengan berbagai indikator ini dapat dikatakan Surabaya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dari keseluruhan data yang telah kita ambil, ada beberapa fakta yang kita tarik dari penelitian ini.

Tingkat Konsumsi Bahan Pokok di Surabaya Terhitung Baik

Tingkat konsumsi bahan pokok di Surabaya terhitung baik. Harga yang lebih rendah daripada provinsi lain berdasarkan perbandingan UMR menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melakukan usaha yang maksimal untuk pengendalian harga. Indikator lain yang menggembirakan adalah bahwa masyarakat Surabaya sudah mulai bisa memilih gaya hidup sesuai tingkat pendapatannya (Fajirin & Indrarini, 2021). Dari penelitian yang dilakukan Fajirin et. All, masyarakat Surabaya memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk gaya hidup Islami yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Tingkat Pembelian Barang Tersier Menggembirakan

Masyarakat Surabaya juga sudah mulai terbiasa melakukan pembelian barang Tersier dan sekunder. Kebutuhan seperti membeli mobil dan rumah jauh lebih baik. Pola konsumsi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang mengalami peningkatan.

Tingkat Indikator Umum Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Sangat Baik

Sebagai kota dagang dan jasa, indikator umum pertumbuhan ekonomi Surabaya sangat baik dan hal ini selaras dengan tingkat konsumsi yang baik juga. Bisa dikatakan ini adalah tingkat pertumbuhan yang baik dan signifikan.

KESIMPULAN

Dilihat dari tingkat pola konsumsinya, kesejahteraan Masyarakat Surabaya terhitung baik, Dengan meminjam konsep *PPP*, terlihat bahwa kemampuan masyarakat Surabaya dalam menjaga kemampuan konsumtifnya terhitung sehat. UMR kota Surabaya dibandingkan dengan harga bahan pokok jauh lebih baik dari Jakarta dan hal ini menunjukkan kota Surabaya telah memastikan upah yang layak bagi masyarakatnya meski kemudian masih perlu ada pembicaraan lebih lanjut dalam konteks kebutuhan sekunder dan tersier.

Indikator kedua adalah dari tingkat pembelian barang sekunder dan tersier juga menunjukkan kesehatan perekonomian masyarakat Surabaya yang berujung pada tingkat konsumsi yang baik. Pembelian rumah dan kendaraan roda empat mengalami peningkatan yang sangat baik. Indikator dari pertumbuhan perbankan di kota Surabaya juga memperlihatkan bahwa Surabaya telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pendapatan dan kemampuan untuk mempertahankan kemampuan beli dengan sangat baik meski kemudian juga perlu ada penilaian lanjutan dari *NPL* warga Surabaya untuk mengetahui seberapa baik sebenarnya kesejahteraan warga Surabaya karena kemampuan melunasi kredit juga bagian dari indikator kesejahteraan warga Surabaya.

Setelah itu, untuk indikator umum, perekonomian kota Surabaya sangat baik dan menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya dibandingkan dengan daerah lain terhitung lebih baik dan bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika Surabaya dapat terus mempertahankan hal ini, maka Surabaya akan memiliki tingkat pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alfiyatin, A. N., Febrita, R. E., Taufiq, H., & Mahmudy, W. F. (2017). Modeling house price prediction using regression analysis and particle swarm optimization case study: Malang, East Java, Indonesia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(10).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Retrieved May 24, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/19/220/1/upah-minimum-regional-propinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Retrieved May 18, 2023, from <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2023/03/30/307/pertumbuhan-ekonomi-kota-surabaya-tahun-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-c). Retrieved May 18, 2023, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- Bappeda Provinsi Jawa Timur – Ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 Tumbuh 5,34 Persen. (n.d.). Retrieved May 18, 2023, from <https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/02/13/ekonomi-jawa-timur-tahun-2022-tumbuh-534-persen/#:~:text=Ekonomi%20Jawa%20Timur%20tahun%202022%20mengalami%20pertumbuhan%20sebesar%205%2C34%20persen.>
- Bosler, M., & Schank, T. (2020). *Wage inequality in Germany after the minimum wage introduction*.
- Fajirin, F. B., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Gaya Hidup dan Tingkat Pendapatan terhadap Perilaku Konsumsi Islami pada New Normal (Studi Kasus Masyarakat Muslim Usia Produktif di Surabaya). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 156–167.
- GIAS Surabaya 2022 Targetkan Transaksi hingga Rp 300 Miliar – GAIKINDO. (n.d.). Retrieved May 25, 2023, from <https://www.gaikindo.or.id/gias-surabaya-2022-targetkan-transaksi-hingga-rp-300-miliar/>
- Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From poverty to disaster and back: A review of the literature. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4, 223–247.
- Hanum, N. (2018). Pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 75–84.
- harga ayam medan 1 kg - Google Search. (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://www.google.com/search?q=harga+ayam+medan+1+kg&client=firefox>

- Harga Daging Sapi di Medan Bertahan Rp 130 Ribu per Kg | Republika Online.* (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/rrnm370/harga-daging-sapi-di-medan-bertahan-rp-130-ribu-per-kg>
- Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in Indonesia over half a century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97.
- Informasi Pangan Jakarta.* (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://infopangan.jakarta.go.id/publik/dashboard/14>
- Ingarianti, T. M., Suhariadi, F., & Fajrianti, F. (2022). Adaptasi alat ukur kesuksesan karier subjektif. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 10(1), 79–88.
- Lu, S., Li, Z., Qin, Z., Yang, X., & Goh, R. S. M. (2017). A hybrid regression technique for house prices prediction. *2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, 319–323.
- Miranti, A., & Syaukat, Y. (2016). *Pola konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat.*
- Murniati, M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Kabupaten Malang. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(2), 189–202.
- Nations, U. (n.d.). *Addressing Poverty | United Nations.* Retrieved May 16, 2023, from <https://www.un.org/en/academic-impact/addressing-poverty>
- Our Big Mac index shows how burger prices are changing.* (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://www.economist.com/big-mac-index>
- Pasar Properti di Surabaya Awal 2022 dan Rekomendasinya.* (n.d.). Retrieved May 25, 2023, from <https://www.rumah.com/areainsider/surabaya/article/pasar-properti-di-surabaya-14382>
- Pemerintah Kota Surabaya.* (n.d.-a). Retrieved May 18, 2023, from <https://surabaya.go.id/id/berita/70940/pertumbuhan-ekonomi-surabaya-capai-717-persen-lebih-tinggi-dari-jawa-timur-dan-nasional>
- Pemerintah Kota Surabaya.* (n.d.-b). Retrieved May 18, 2023, from <https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8177/sosial-ekonomi>
- Puspita, C. D., & Agustina, N. (2019). Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, Serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi Yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1)*, 700–709.
- Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. *Journal of Economic Literature*, 34(2), 647–668.

Suhartini, E., Hartiwaningsih, H., Handayani, I., & Roestamy, M. (2019). Legal politics and policy setting of wage systems for creating social justice of workers. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(6).

Update Harga Beras Hari Ini, Sabtu 18 Maret 2023: Beras Medium Masih Stabil Rp 11.900 per Kg - TribunNews.com. (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/03/18/update-harga-beras-hari-ini-sabtu-18-maret-2023-beras-medium-masih-stabil-rp-11900-per-kg>

Update Harga Pangan Hari Ini: Harga Minyak Goreng Curah Turun. (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220711/12/1553481/update-harga-pangan-hari-ini-harga-minyak-goreng-curah-turun>